

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja suatu negara dapat dikatakan baik adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut, semakin pertumbuhan ekonomi suatu negara mengarah ke tingkatan yang positif maka dapat dikategorikan kinerja negara tersebut baik. Pertumbuhan ekonomi suatu negara mengarah ke tingkatan yang negatif maka dapat dikategorikan kinerja negara tersebut buruk, ketika kinerja negara buruk maka dapat berdampak buruk bagi masyarakatnya sendiri, karena negara akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan standar taraf hidup masyarakatnya.

Pembangunan infrastruktur dapat diartikan sebagai usaha atau proses terencana dan terprogram yang dilakukan secara bertahap maupun secara terusmenerus oleh suatu negara untuk menciptakan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengertian yang paling mendasar dari pembangunan adalah pembangunan itu harus mencakup hal materi dan finansial dalam kehidupan. Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu negara, infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat (Rahmadani, 2018).

Infrastruktur memiliki peran penting dalam jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat baik di daerah terpencil maupun daerah yang besar. Masyarakat Indonesia merasa bahwa pada masa perkembangan

ekonomi saat ini perlunya dituntut ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai agar dapat menunjang kegiatan pertumbuhan ekonomi terutama di daerah terpencil. Keberadaan infrastruktur yang baik dapat mendorong peningkatan produktivitas di tiap daerah serta dapat membantu meningkatkan investasi yang lebih besar dan memiliki dampak yang baik untuk masa jangka panjang. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa menciptakan disparitas atau kesenjangan pendapatan per kapita setiap daerah yang berada di negara Indonesia, terutama pada kawasan Indonesia Timur (Sumardjoko, 2019).

Menurut Suratno (2010), pada penelitiannya mengatakan laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu daerah maupun pada suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, dan energi. Hal inilah yang menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan bertambahnya infrastruktur serta peningkatan perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah maupun negara.

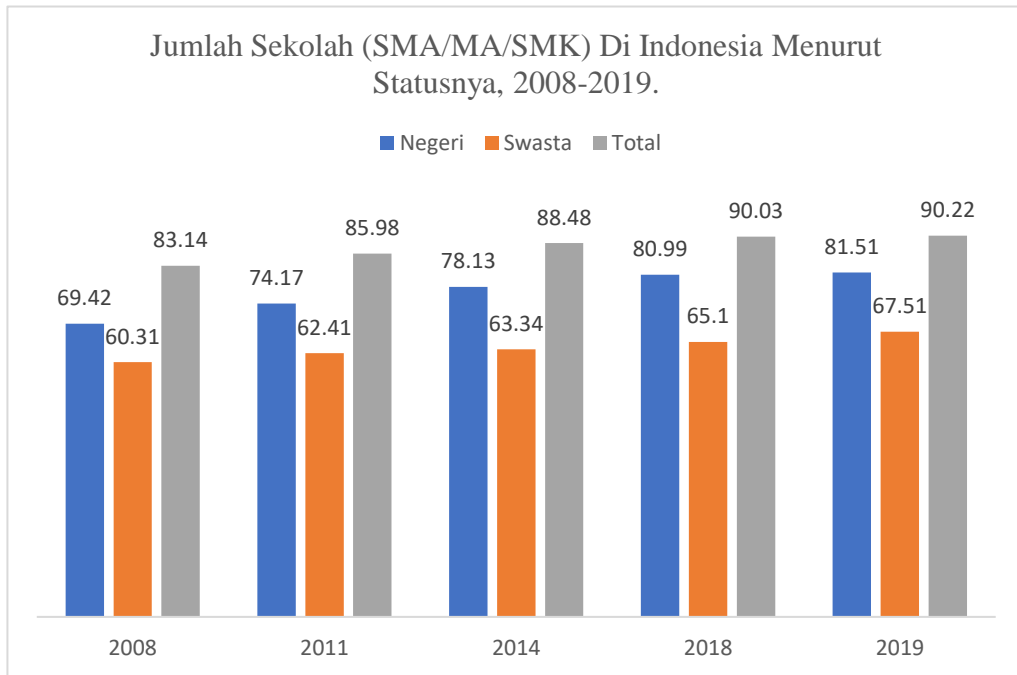
Pembangunan infrastruktur dapat dikatakan sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Infrastruktur juga memiliki pengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, antara lain pada peningkatan nilai konsumsi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan akses lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan secara nyata dan terwujudnya stabilitas makroekonomi, yaitu berkelanjutan fiskal, berkembangnya

pasar kredit, serta memiliki pengaruh terhadap pasar tenaga kerja (Dewi dan Gusni, 2019).

Menurut Ramessur *et all* (2009) pembangunan infrastruktur dibutuhkan oleh setiap negara guna menopang dunia usaha, sehingga peningkatan infrastruktur diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mampu mengurangi kemiskinan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan memiliki tujuan antara lain untuk mempermudah mobilitas orang, barang dan jasa, diharapkan untuk ke depannya di masa yang akan mendatang dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan

Sarana infrastruktur pendidikan adalah salah satu infrastruktur sosial yang sangat vital dan memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat. Sejak adanya peraturan wajib belajar 12 tahun, kebutuhan akan fasilitas pendidikan menengah menjadi makin meningkat. Tahun 2019, semua kabupaten di Indonesia telah ada fasilitas pendidikan menengah, namun sangat disayangkan belum semua kecamatan di Indonesia memiliki fasilitas pendidikan menengah, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus makin meningkat, banyak fasilitas pendidikan menengah baru yang dibangun (Cahyaningtias *et al*, 2019).

Gambar 1.1
Persentase Kecamatan Yang Ada SMA/MA/SMK
Di Indonesia Menurut Statusnya, 2008-2019.

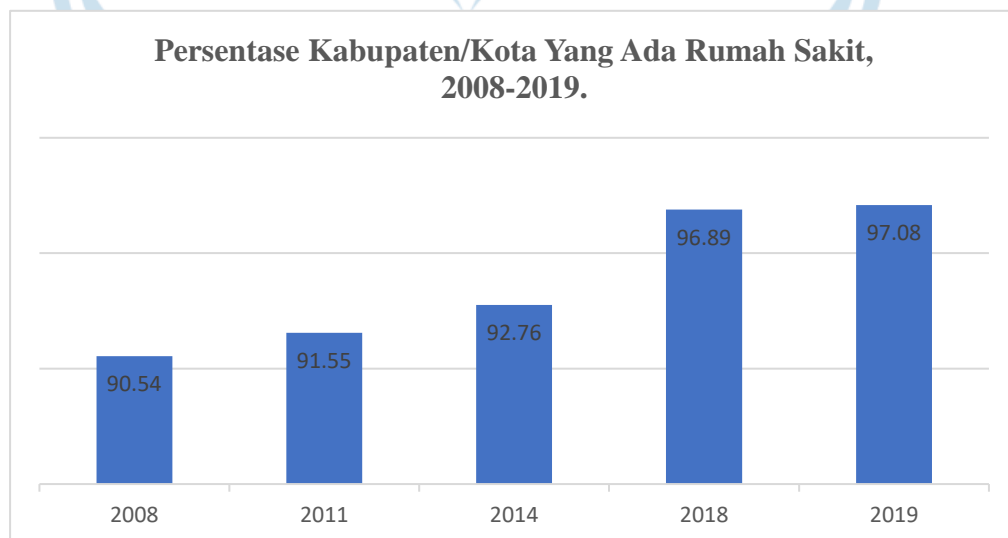


Sumber: BPS, Podes 2008-2019.

Gambar 1 menunjukkan data perkembangan pembangunan infrastruktur SMA/MA/SMK tiap kecamatan yang ada di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada awal tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 jumlah persentase penambahan sekolah makin meningkat setiap pertiga tahunnya. Fasilitas pendidikan sekolah menengah sudah dianggap cukup layak, namun persebaran pembangunan SMA/MA/SMK masih belum merata, terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sejak tahun 2008 hingga 2019, persentase kecamatan yang ada SMA/MA/SMK pada kedua provinsi tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan angka nasional.

Menurut Suherman (2018) Infrastruktur kesehatan juga memiliki peran penting dalam membantu pengurangan kemiskinan. Infrastruktur kesehatan meliputi infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas kesehatan seperti rumah sakit, dan puskesmas. Rumah sakit merupakan salah satu sarana infrastruktur sosial yang sangat vital dan penting di tiap daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rumah sakit adalah sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter dan perawat. Kesehatan masyarakat sangat berdampak pada produktivitas dan pendapatan masyarakat, oleh karena itu kesehatan masyarakat memiliki keterkaitan dengan kemiskinan.

Gambar 1.2
Persentase Kabupaten/Kota Yang Ada Rumah Sakit, 2008-2019.



Sumber: BPS, Podes 2008-2009.

Gambar 2 menunjukkan keberadaan rumah sakit di tiap kabupaten/kota terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2008-2019. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 terdapat sekitar 90,54 persen kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki fasilitas rumah sakit, dan terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan sampai dengan tahun 2019 terdapat sekitar 97,08 persen.

Menurut Salim (2006) pemerintah semestinya diharapkan memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten karena jalan itu akan membuka akses transportasi dan informasi ke berbagai pelosok, sehingga perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jalan dapat memberikan dampak tidak langsung bagi peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian.

Tabel 1.1
Persentase Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan
Kabupaten/Provinsi/Negara, 2017-2019

Tingkat Kewenangan Jalan	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan (km)		
	2017	2018	2019
Jalan Negara	47.017,00	47.071,00	47.042,00
Jalan Provinsi	54.554,00	54.554,00	54.749,00
Jalan Kabupaten/Kota	437.782,00	440.739,00	442.701,00
Jumlah	539.353,00	542.310,00	544.474,00

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Pekerjaan Umum

Pemerintah Prov/Kab/Kota.

Jumlah Panjang jalan di Indonesia makin bertambah setiap tahunnya baik itu jalan kabupaten/kota, jalan provinsi, jalan negara. Berdasar data pada gambar 3 dapat dilihat terjadinya penambahan jumlah panjang jalan setiap tahunnya, baik itu jalan kabupaten/kota, jalan provinsi, dan jalan negara. Tahun 2017 panjang jalan negara 47.017,00 km, panjang jalan Provinsi 54.554,00, panjang jalan kabupaten/kota 437.782,00 km, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 panjang jalan negara 47.024,00 km, panjang jalan provinsi 54.749,00 km, panjang jalan kabupaten/kota 442.701,00 km.

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia adalah masalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang berada di Indonesia jika dibiarkan tanpa ada penanganan dari pihak pemerintah akan berdampak pada berbagai masalah sosial ekonomi seperti tingkat buta huruf, rendahnya tingkat kesehatan, jumlah pengangguran yang tinggi, dan buruknya lingkungan hidup, dan salah satu strategi penanggulangan masalah kemiskinan dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur yang baik. Kemiskinan adalah fenomena global yang muncul tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang tersedia, tetapi juga timbul karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, informasi, peluang, pemberdayaan, serta mobilitas (*World Bank*, 1994).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Indonesia dipandang sebagai tidak adanya kemampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, jadi penduduk miskin adalah penduduk atau masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut Yacoub

(2012), pada penelitiannya mengatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara yang ada di dunia ini.

Menurut Misbach (2009), pada penelitiannya mengatakan seiring berkembangnya zaman kemiskinan memiliki definisi baru, kemiskinan bukan lagi sekadar masalah kesenjangan pendapatan tetapi lebih kompleks yaitu menyangkut tidak adanya kemampuan, ketiadaan pengetahuan dan keterampilan. Kemiskinan sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusianya. Kemiskinan akan muncul karena sumber daya manusianya tidak atau kurang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diartikan sebagai upaya untuk menghapus atau memberantas kemiskinan.

Gambar 1.3
Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun, 2015 – 2020.



Sumber : Databoks Tahun 2020.

Gambar 4 adalah data tingkat kemiskinan yang diperoleh dari databoks, berdasarkan data tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya, namun dengan adanya gejala pandemi *Covid-19* tingkat kemiskinan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Penurunan tingkat kemiskinan ini menandakan keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan (Databoks,2020).

Menurut Jamco (2015), pada penelitiannya menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang penuh kontroversial, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat, ketika data telah tersedia pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan secara singkat pada bagian pengantar, maka saya selaku peneliti akan merumuskan masalah yang akan dianalisis ataupun dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia, 2010-2020.
2. Bagaimanakah pengaruh pembangunan infrastruktur kesehatan terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia, 2010-2020.
3. Bagaimanakah pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia, 2010-2020.
4. Bagaimanakah pengaruh pembangunan infrastruktur listrik terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia, 2010-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia, 2010-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur kesehatan terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia, 2010-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia, 2010-2020.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur listrik terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia, 2010-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Pemerintah, sebagai salah satu masukan bermanfaat bagi pemerintah dan instansi terkait.
2. Masyarakat, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui pentingnya pembangunan infrastruktur sosial dan pembangunan infrastruktur ekonomi di Indonesia yang dapat membantu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Peneliti dan Pembaca, sebagai bahan referensi dan pembandingan studi atau penelitian yang terkait dalam riset ini.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan teori serta hasil dari penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Diduga pembangunan infrastruktur pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin pada 33 provinsi di Indonesia, 2010-2020.
2. Diduga pembangunan infrastruktur kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin pada 33 provinsi di Indonesia, 2010-2020.

3. Diduga pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin pada 33 provinsi di Indonesia, 2010-2020.
4. Diduga pembangunan infrastruktur listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin pada 33 provinsi di Indonesia, 2010-2020.



1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis seperti yang diuraikan berikut ini:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang teori-teori yang digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode dan analisis data.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi daerah penelitian, analisis data, hasil analisis data dan pembahasan.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan atau kendala dalam penelitian, serta saran-saran yang disampaikan baik untuk objek penelitian ataupun penelitian selanjutnya.